Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bogor

LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja Kegiatan (LAKIP)

Tahun **2024**

(0251) 8334949

kominfo@kotabogor.go.id

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16121

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja serta sasaran dengan target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pelaksanaan *e-Government* di Kota Bogor.

Bogor, Desember 2024

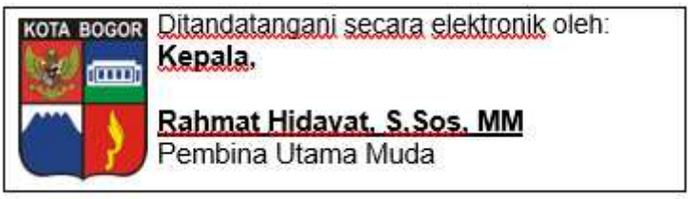

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. GAMBARAN UMUM *1*

B. CASCADING KINERJA *3*

C. PETA PROSES BISNIS *4*

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI *4*

E. SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA *6*

F. TINDAKLNJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2022 ..... *9*

G. DASAR HUKUM *9*

BAB II PERENCANAAN KINERJA **12**

A. PERENCANAAN KINERJA *12*

A.1. Tujuan Dan Sasaran *12*

A.2. Strategi Dan Arah Kebijakan *13*

B. PERJANJIAN KINERJA *14*

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 ..... *17*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **20**

A. CAPAIAN KINERJA *20*

A.1. Sasaran 1 : tersedianya data Statistik Sektoral *22*

A.2. Sasaran 2 : Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi *30*

A.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah *38*

A.4. Sasaran 4 : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance *46*

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN *65*

BAB IV PENUTUP **68**

A. KESIMPULAN *68*

B. SARAN *69*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor yaitu Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seirama dengan tuntutan zaman dan kemajuan teknologi. Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Misi Kedua Pemerintah Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu dinas yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis sebagai leading sektor dalam implementasi smart city berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kota Bogor sebagai smart city sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Diskominfo Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

1. Infrastruktur pusat data belum memenuhi standarisasi tier pusat data;
2. Semakin kompleksnya penyelenggaraan aplikasi;
3. Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil (bandwidth belum mencukupi);
4. Adanya rasa takut pejabat informasi publik terhadap dampak dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
5. Dalam penetapan aspek kualitas dan ketepatan waktu belum menggunakan standar/pedoman yang sama;
6. Masih terdapat banyak celah kerentanan pada perangkat keamanan informasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kestabilan pelayanan pusat data;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM talenta digital;
3. Mengalokasikan dana secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Mewajibkan seluruh PPID pelaksana untuk mempublikasikan informasi melalui web PPID masing-masing perangkat daerah;
5. Mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk menerapkan perwali No. 23 Tahun 2021 tentang SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

B. CASCADING KINERJA

Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah di terapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, yang mana setiap Perangkat Daerah agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor dibentuk dengan skema casdading kinerja sebagai berikut :

Gambar Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

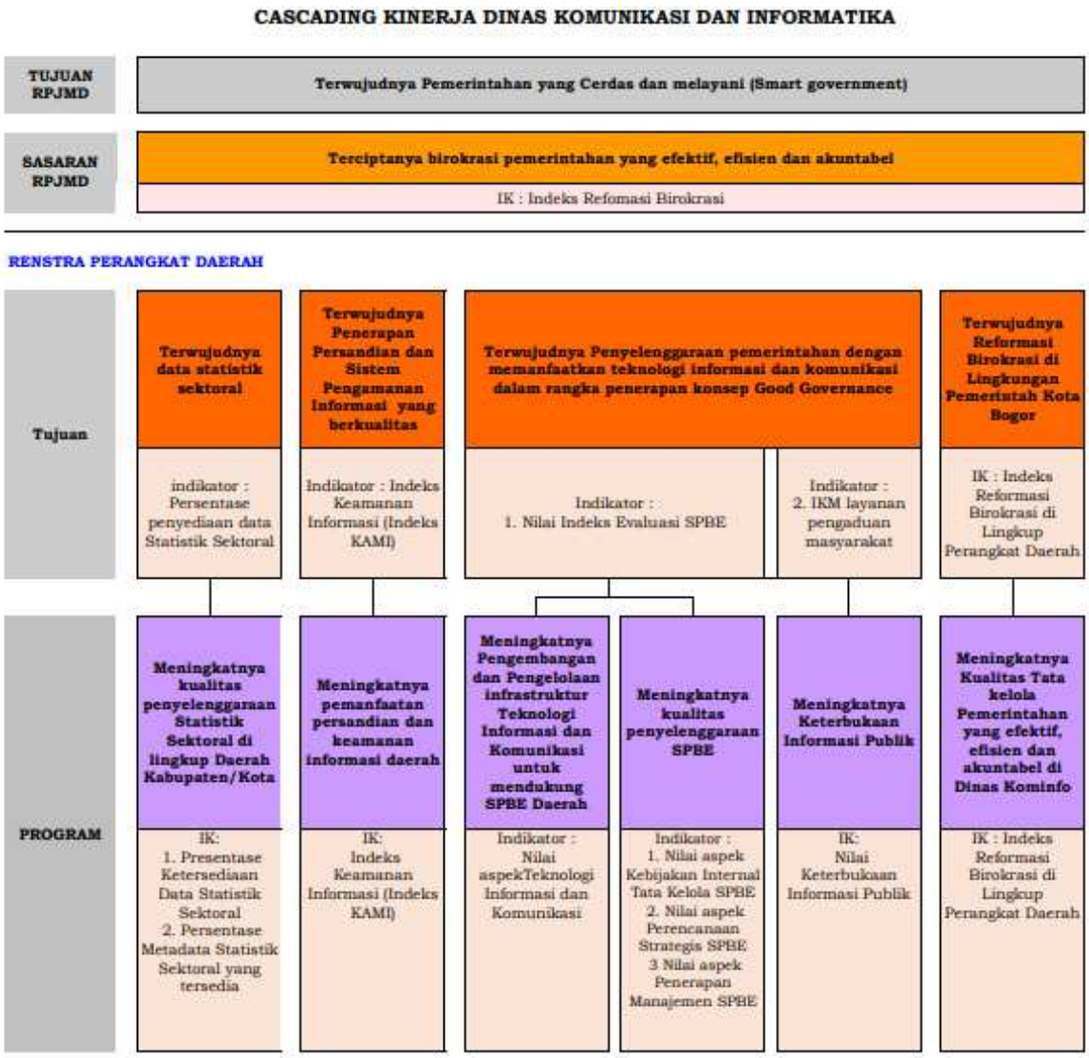

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

C. PETA PROSES BISNIS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Nomor 800/856-Diskominfo Tahun 2022 tentang peta proses bisnis di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, maka Peta Proses Bisnis pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

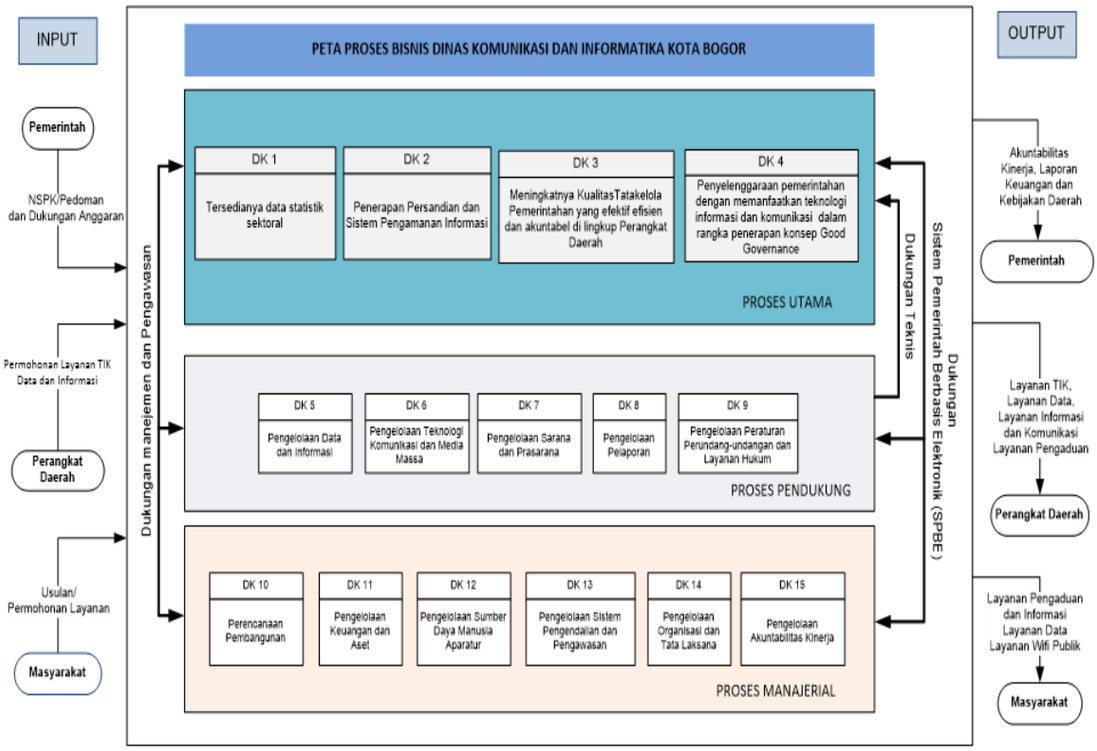

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

termasuk kedalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:

a. **Kepala Dinas;**

b. **Sekretariat, membawahkan:**

   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. **Bidang Statistik Sektoral membawahkan** Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan** Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. **Bidang Jaringan, Domain dan Persandian membawahkan** Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

f. **Bidang e-Government, membawahkan** Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan dan perumusan kebijakan di pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4) pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

E. SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti umur, pendidikan, golongan, dan sarana dan prasarana berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Persentase Pegawai per golongan

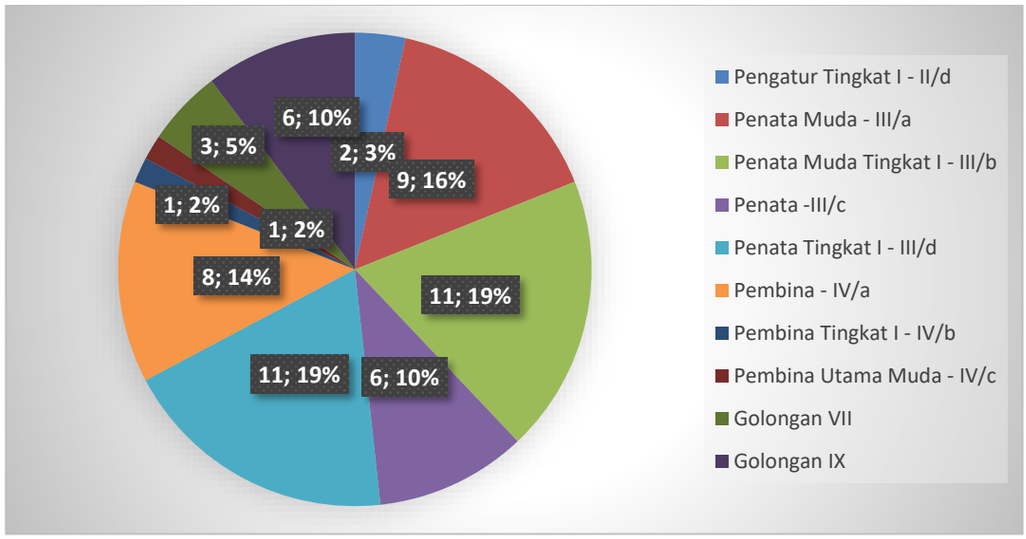

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan usia

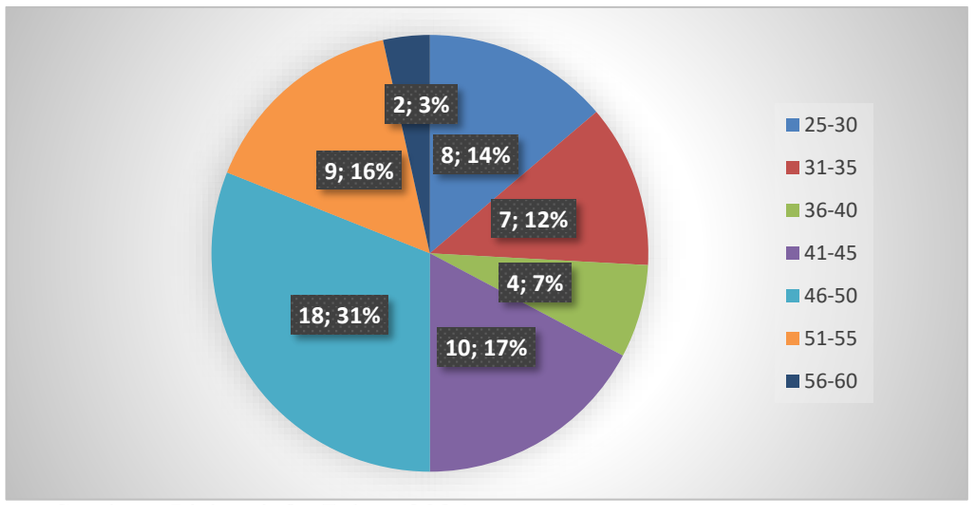

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

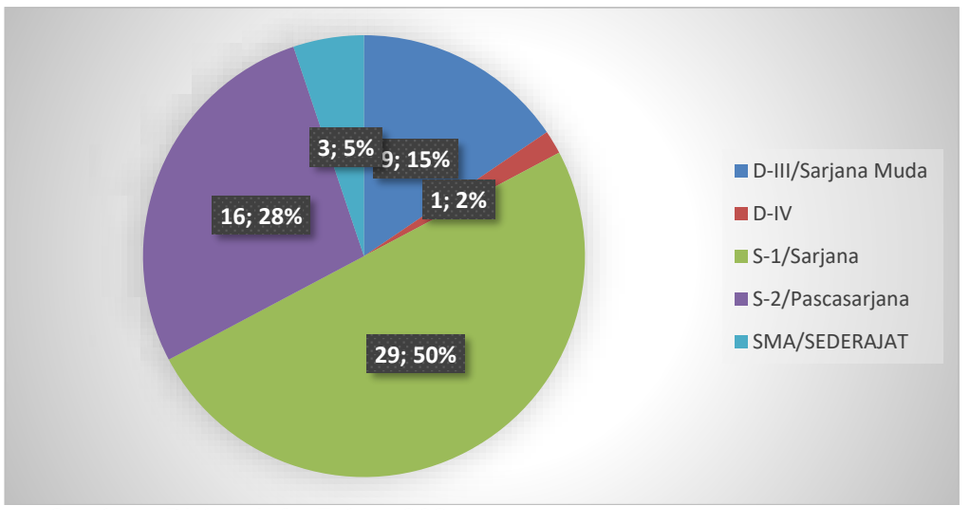

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Prasarana dan Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
2.	Kendaraan Roda 2 Matic 150 cc	7	Unit
3.	PC	54	Unit
4.	Note Book	14	Unit
5.	Printer inkjet	6	Unit
6.	AC	42	Unit
7.	Mesin Tik Elektrik	2	Unit
8.	Mesin Penghancur	1	Unit
9.	Dispenser	4	Unit
10.	Kulkas 2 Pintu	2	Unit
11.	Lemari Besi	2	Unit
12.	Filling Cabinet	5	Unit
13.	Kursi Kerja Putar	62	Unit
14.	Meja Kerja	55	Unit
15.	Kursi Tamu	2	Unit
16.	Laptop (berbagai merk)	28	Unit
17.	Hardisk External	8	Unit
18.	Monitor 21.5	1	Unit
19.	Proyektor	5	Unit
20.	Layar Proyektor	3	Unit
21.	Lemari Rak Arsip Kayu	17	Unit
22.	Anjungan Informasi Publik	18	Unit
23.	Server	20	Paket
24.	Genset	1	Unit
25.	CCTV Taman Kota	7	Unit
26.	CCTV Monitoring	34	Unit
27.	Handy Talky	23	Unit
28.	Action Camera	1	Unit
29.	Camera	5	Unit
30.	Tripod	5	Unit
31.	Printer Epson	20	Unit
32.	Lemari Locker	1	Unit
33.	Microphone Headset	17	Unit
34.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur Bogor Barat dan Jalur Kelurahan Loji	1	Paket
35.	Jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur TanahSareal Rute Sukaresmi-Sukadamai	1	Paket
36.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure Cipaku – Pamoyanan	1	Paket
37.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Rute Cibuluh - Tanah Baru	1	Paket
38.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure PUPR dan BPKSDA (Gedung Baru)	1	Paket
39.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Rumdin - MPP	1	Paket`
40.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Payonan - Rangga Mekar	1	Paket`
41.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Damkar - Sukasari	1	Paket`
42.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Genteng - Kertamaya	1	Paket`
43.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota BogorFO Semplak - Curug	1	Paket`

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

F. TINDAKLNJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 yang menilai akuntabilitas kinerja tahun 2023, terdapat 1 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Adapun rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024

No	Kelemahan Atas Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Keterangan
			S	D	B	
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat DaerahDinas Komuni-kasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2023 belum dilakukan reviu oleh Tim Internal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	Melaksanakan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilengkapi dengan lembar kendali reviu berjenjang laporan Kinerja.	√	-	-	lembar kendali reviu berjenjang laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
	Jumlah		1	-	-	

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

G. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024;
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2022 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 130 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Kota Bogor;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan pada dokumen Rencana Strategis 2019-2024. Dokumen Renstra tersebut telah disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebutuhan dalam pencapaian tata kelola *e-Government* dan *Smart City* untuk mewujudkan misi kedua Kota Bogor.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung terlaksananya misi kedua pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”. Untuk mewujudkan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

A.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Data Statistik Sektoral
	Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi
	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah
Peningkatan kualitas smart government	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

A.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tersedianya Data Statistik Sektoral	Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data	Menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya sumber data dan informasi Statistik Sektoral
Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi	Merumuskan regulasi yang mengatur tentang keamanan informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Meningkatkan tata kelola kelembagaan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK.
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK.	Peningkatan prasarana dan sarana data center sesuai standar.
		Penyediaan jaringan fiber optik di perangkat daerah.
		Penetapan regulasi pengelolaan server.
		Memenuhi Kebutuhan Server Back Up Data dan DRC.
		Penyediaan dan Pemeliharaan CCTV.
		Melaksanakan penataan dan pemeliharaan CCTV se-Kota Bogor.
		Melaksanakan Layanan Telekonferensi Pemerintah.
	Meningkatkan Layanan Interoperabilitas.	Menyelenggarakan Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi bagi Seluruh Perangkat Daerah dengan menetapkan standar format data dan aplikasi.
		Menyelenggarakan Layanan Application Programm Interface (API) daerah.
		Melaksanakan layanan epository/Datawarehouse.
		Penetapan Regulasi tentang Hak Akses, Pengelolaan Data Base dan Datawarehouse.
		Meningkatkan jumlah sistem informasi yang di integrasikan.
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat berbasis elektronik dan media cetak.
	Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik	Integrasi layanan pengaduan non kedaruratan (call center) dengan layanan kedaruratan (NTPD) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Wali Kota Bogor dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

mewujudkan target kinerja melalui pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil ataupun manfaat.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota dan Kepala Dinas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 diejaskan dalam tebel berikut :

Tabel Matriks Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	89%	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**267,165,500**
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	267,165,500
				Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	71,344,000
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	94,218,000
				Pengembangan Infrastruktur	101,603,500
2	Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	level 2	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**105,655,100**
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	105,655,100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	105,655,100
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	87.5	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota**	**15,805,610,153**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,349,600
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,349,600
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,828,048,892
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,775,250,892
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	52,798,000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	364,138,300
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6,119,200
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92,265,500
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,218,600
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,535,000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61,514,569
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,564,569
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,950,000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,260,198,792
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,251,198,792
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283,360,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223,340,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,020,000
4	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	3,72 Indeks	**Program Aplikasi Informatika**	**4,413,479,736**
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh	2,934,345,652

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance			Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten	66,540,000
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2,867,805,652
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1,479,134,084
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	210,208,400
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	31,328,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	416,540,184
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	349,971,200
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	413,028,700
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	58,057,600
		IKM layanan pengaduan masyarakat	85.5	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3,553,654,289**
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,553,654,289
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	344,226,132
				Layanan Hubungan Media	317,664,557
				Pelayanan Informasi Publik	2,891,763,600

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 24.145.564.778,- (Dua puluh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

empat milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Adapun komposisi anggaran dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	KOMPOSISI
5	**BELANJA DAERAH**	**24,145,564,778.00**	**100%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**24,129,951,078.00**	**99.94%**
5.1.01	Belanja Pegawai	13,016,590,892.00	53.94%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,113,360,186.00	46.06%
5.2	**BELANJA MODAL**	**15,613,700.00**	**0.06%**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,613,700.00	100%

Sumber : Diskominfo 2024

Dari keseluruhan pagu anggaran Dinas, anggaran dialokasikan pada belanja operasi sebesar 99,94% dengan belanja pegawai sebanyak 53,94% dan belanja barang dan jasa sebanyak 46,06%.

Sedangkan belanja modal dari total keseluruhan belanja dinas, dianggarkan sebesar 0,06% yang seluruhnya 100% diperuntukkan untuk belanja modal dan peralatan mesin.

Adapun pagu anggaran pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dalam gambar diagram berikut :

Tabel Pagu Anggraran berdasarkan Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN	KOMPOSISI (%)
Tersedianya data statistik sektoral	267.165.500	1,11
Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	105.655.100	0,44
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	15.805.610.153	65,46
Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	7.967.134.025	33,00

Sumber : Diskominfo 2024

Dari keseluruhan pagu Dinas Komunikasi dan Informatika, komposisi anggaran terbesar dialokasikan pada sasaran meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah, yang didikung oleh program penunjang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

urusan pemerintah daerah. Kedua pada sasaran Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance, yang didukung oleh program Program Aplikasi Informatika dan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya sasaran Tersedianya data statistik sektoral yang ditunjang oleh program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terakhir sasaran Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi yang didikung oleh program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja tersebut telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kota Bogor, bidang statistik dan bidang persandian dalam mendukung visi dan misi Wali Kota.

Tabel Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Ingormatika Kota Bogor Tahun 2020-2021

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
Tujuan 1 : Peningkatan kualitas smart government								
Sasaran 1 : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	Indeks	2,92	2,92	2,97	3,11	101,71	106,51
	Peningkatan layanan pengaduan masyarakat	%	85	90	78	76	91,76	84,44
Sasaran 2 : Tersedianya data statistik sektoral	Jumlah penyajian statistik sektoral	buku	2	2	1	2	50	100
Tujuan 2 : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional								
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas	Nilai	BB	BB	BB	A	113,86	114,83
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	90	90	90	90	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Ingormatika Kota Bogor Tahun 2021-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor													
Tersedianya data statistik sektoral	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	NA	82%	NA	79%	86%	108,86%	84%	88%	104,76%	89%	89,00%	100,00%
Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	level 1	level 1	100%	level 2	level 2	100%	level 2	level 2	100%	level 2	level 2	100%
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	80,01	71,02	88,76%	81	87,42	107,93%	87,5	90,52	103,43%
Tujuan 2 : Peningkatan kualitas smart government													
Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	2,92	3,11	106,51%	2,98	2,75	92,28%	2,98	3,72	124,83%	3,72	4,08	109,68%
	IKM layanan pengaduan masyarakat	NA	77,70%	NA	82%	84,92%	103,56%	85%	85,41%	100,48%	85,5%	81,8%	95,65%

Sumber : Diskominfo 2024

Pada Tahun 2022, telah terjadi perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan sasaran strategis dan indicator utama perangkat daerah.

Secara umum, capaian pada indikator kinerja Utama tahun 2021 s.d. 2024 dari 5 indikator, rata-rata meningkat realisasinya. Kecuali pada indicator IKM layanan, pada tahun 2024 menurun realisasinya yang tidak mencapai target.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara rinci, capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah sebagai berikut :

A.1. Sasaran 1 : tersedianya data Statistik Sektoral

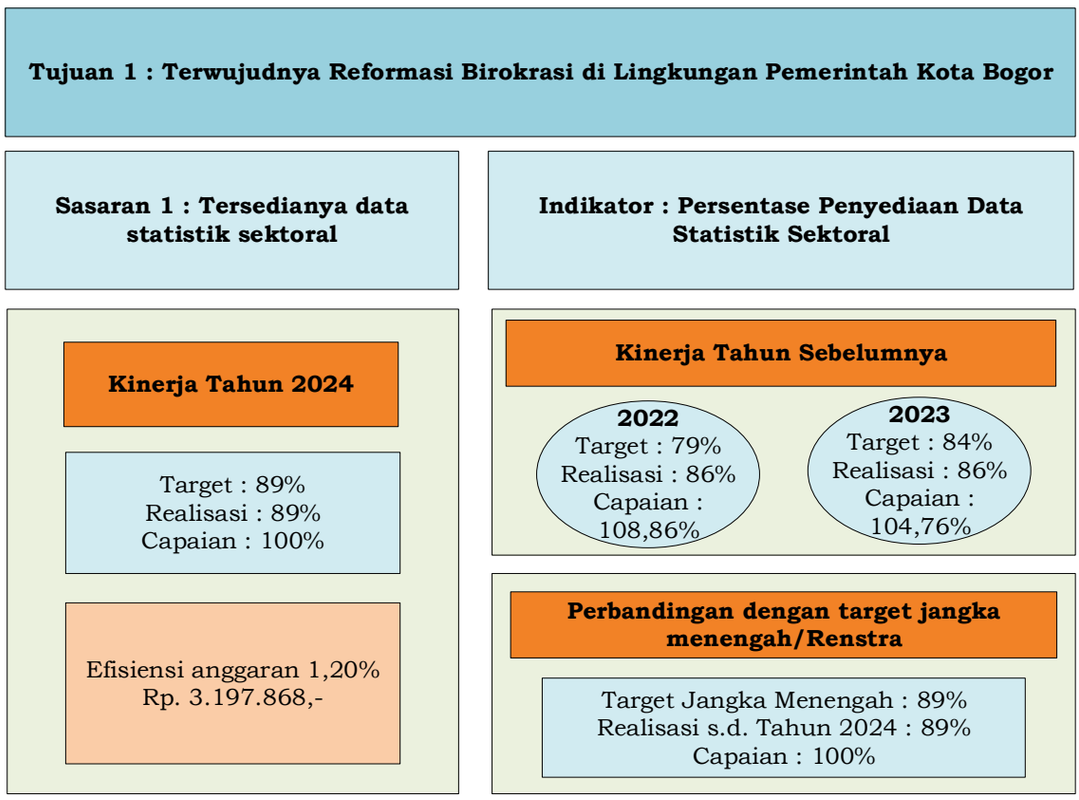

a. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mewujudkan tersedianya data statistic sectoral. Hal ini tercermin dari pencapaian presentase penyediaan Data Statistik Sektoral sebesar 100%, yaitu dari target 89% dan terealisasi 89%.

Realisasi presentase penyediaan Data Statistik Sektoral sebesar 100% artinya Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dibandingkan dengan jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan telah terealisasi 89%.

Tersedianya data statistik sektoral sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak terutama oleh Pemerintah dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan evaluasi pembangunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada aspek realisasi, Persentase penyediaan data Statistik Sektoral meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 88% dan di tahun 2024 sebesar 89%. Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja Persentase penyediaan data Statistik Sektoral mengalami penurunan 4,76% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 104,76% dan pada tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Peresentasi Penyediaan Data Statistik Sektoral beberapa tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	NA	82%	NA
2022	79%	86%	108,86%
2023	84%	88%	104,76%
2024	89%	89%	100%

Sumber : Diskominfo 2024

Dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, berdasarkan pada tabel di atas, persentase penyediaan data Statistik Sektoral pada tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan bahwa realisasi penyediaan data statistik meningkat dari tahun ke tahunnya, yaitu 82% pada tahun 2021, meningkat menjadi 86% pada tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 86% pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 meningkat menjadi 89%. Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, yaitu 108,86% pada tahun 2022, menjadi 104,76% pada tahun 2023 dan menjadi 100% pada tahun.

Gambar Diagram Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Peresentasi Penyediaan Data Statistik Sektoral

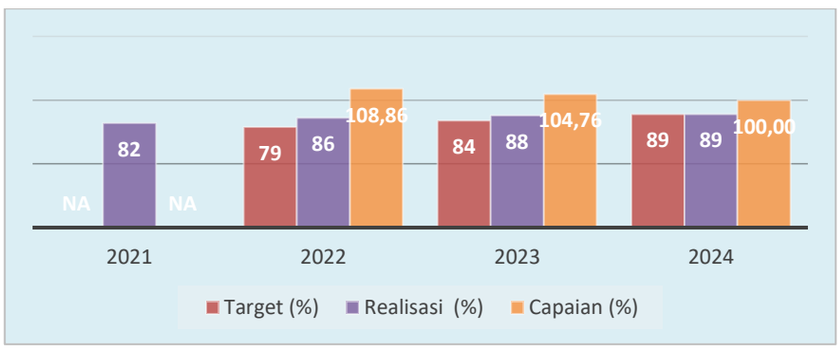

Sumber : Diskominfo 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi kinerja Peresentasi Penyediaan Data Statistik Sektoral sudah mencapai target akhir RPJMD/Renstra sebesar 100%. Yaitu dari target akhir renstra sebesar 89% dan terealisasi 89%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Karena indikator ini hanya digunakan di kota Bogor saja, maka perbandingan dengan rata-rata nasional tidak dapat dianalisis.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2024

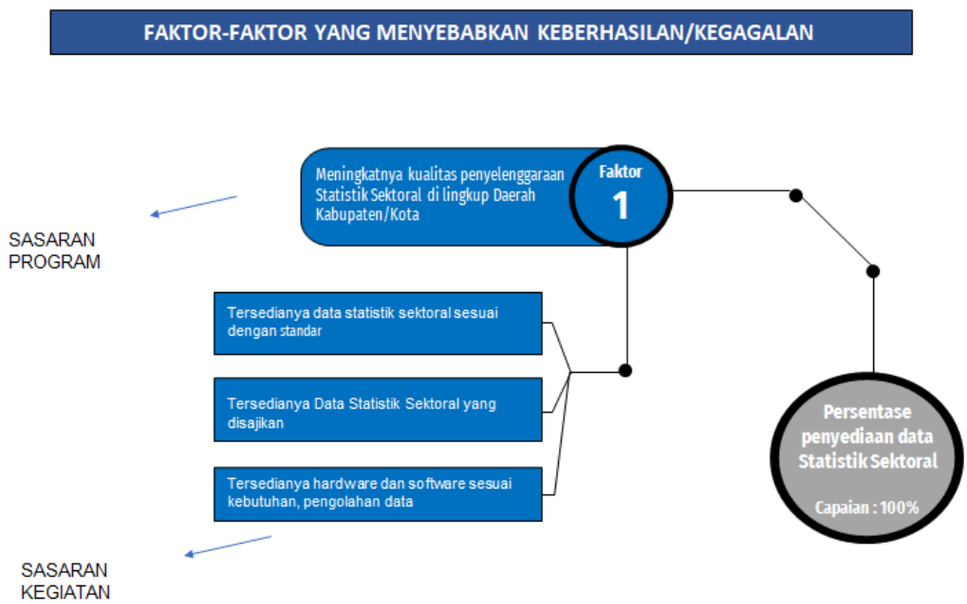

Berdasarkan gambar di atas, Peresentasi Penyediaan Data Statistik Sektoral dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang diperlihatkan dari realisasi indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 89% dan realisasi Persentase metadata statistik sektoral yang tersedia sebesar 24,41%. Yang didukung oleh tersedianya data statistik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

sektoral yang sesuai standar, tersedianya data statistik sektoral yang disajikan dan tersedianya hardware dan software sesuai kebutuhan pengolahan data.

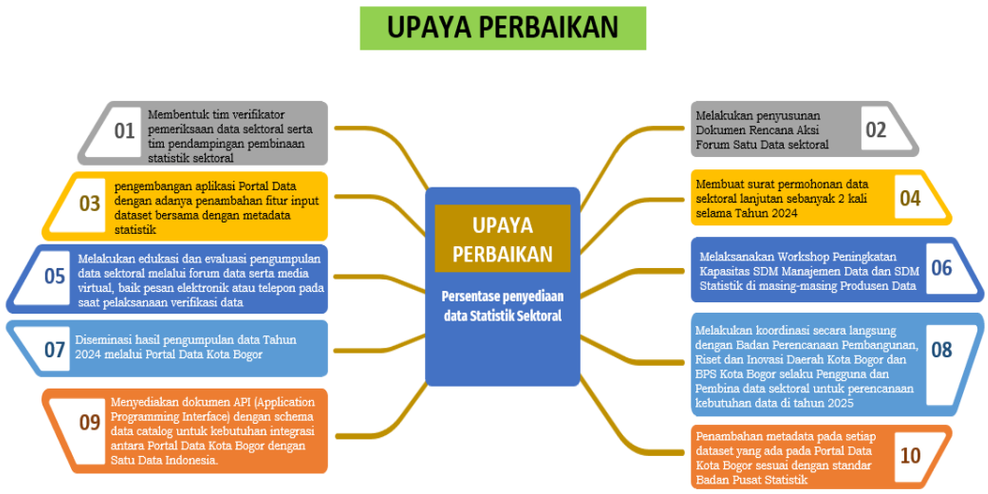

Keberhasilan pencapaian target kinerja di tahun 2024 dengan capaian 100% didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut :

Diskominfo telah membuat surat edaran Sekda untuk seluruh produsen data baik unit kerja horizontal dan vertikal Kota Bogor terkait kebutuhan data pembangunan serta jadwal pengumpulan data tahun 2024. selain itu Diskominfo khususnya Bidang Statistik Sekotral telah melakukan pendampingan kepada seluruh produsen data pada saat proses pengumpulan data tahun 2024 baik secara media virtual pesan elektronik atau telepon. kemudian Telah dilakukannya edukasi dan evaluasi pengumpulan data sektoral melalui forum data.

Selain itu, telah pula dikembangkannya **inovasi** sebagai berikut :

1) Membentuk tim verifikator pemeriksaan data sektoral serta tim pendampingan pembinaan statistik sektoral.
2) Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Forum Satu Data untuk mematangkan rencana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.
3) Ketersediaan data statistik sektoral juga didukung dengan dilakukannya pengembangan aplikasi Portal Data dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

adanya penambahan fitur input dataset bersama dengan metadata statistik.

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1) Permasalahan kesalahan menganalisa kebutuhan fitur tambahan pada aplikasi satu data (portal data) statistik sektoral.
   Solusi : Bidang Statistik Sektoral melaksanakan rapat bersama pengembang aplikasi serta perwakilan dari bidang-bidang lain untuk memberikan saran terkait aplikasi portal data yang dikembangkan serta menyediakan waktu perencanaan pengadaan fitur tambahan pada aplikasi satu data (portal data) statistik sektoral lebih awal.

2) Permasalahan Keterlambatan proses pengembangan aplikasi satu data (portal data) statistik sektoral.
   Solusi : Bidang Statistik Sektoral melakukan pendataan permintaan fitur tambahan pada aplikasi satu data (portal data) statistik sektoral sebelum jadwal pengembangan aplikasi dilakukan.

3) Permasalahan terkait lambatnya respon yang diberikan oleh pengembang terhadap usul atau ide dalam pengembangan Portal Data
   Solusi : Bidang Statistik Sektoral melaksanakan rapat dengan pengembang aplikasi untuk memberikan arahan apa saja yang menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan dalam proses pengembangan aplikasi portal data.

4) Permasalahan kurang proaktif, kurang komitmen, dan keterbatasan kemampuan SDM dari produsen data di Perangkat Daerah pada proses pengumpulan data sehingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
   Solusi : Bidang Statistik Sektoral telah membuat surat permohonan data sektoral lanjutan sebanyak 2 kali selama Tahun 2024 untuk mengingatkan dan menghimbau secara berkala agar tetap tercapai kebutuhan data sesuai target yang telah ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

5) Permasalahan data statistik sektoral tidak valid atau belum sesuai dengan kebutuhan data.

   Solusi : Bidang Statistik Sektoral melakukan edukasi dan evaluasi pengumpulan data sektoral melalui forum data serta media virtual, baik pesan elektronik atau telepon pada saat pelaksanaan verifikasi data. Diskominfo menginisiasi terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Data dan SDM Statistik di masing-masing Produsen Data sebagai pembekalan pengetahuan dalam mengelola data sektoral.

6) Permasalahan tidak maksimalnya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kota Bogor karena keterbatasan anggaran yang ada. Terdapat beberapa program yang telah direncanakan tetapi tidak dapat dijalankan karena tidak ada anggaran yang menunjang keterlaksanaan program tersebut. Seperti kegiatan Penyusunan Buku Induk Statistik dan Asistensi Kebutuhan Data Sektoral.

   Solusi : Bidang Statistik Sektoral melakukan diseminasi hasil pengumpulan data Tahun 2024 melalui Portal Data Kota Bogor dan melakukan koordinasi secara langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor dan BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bogor selaku Pengguna dan Pembina data sektoral untuk perencanaan kebutuhan data di tahun 2025.

f. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Peresentasi Penyediaan Data Statistik Sektoral

Pencapaian sasaran Tersedianya data statistik sektoral dengan indikator Persentase penyediaan data Statistik Sektoral didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Adapun pencapaian target kinerja nya dijelaskan dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel capaian program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	89%	89%	100
	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	6%	24,41%	406

Sumber : diskominfo 2024

Pencapaian target Persentase ketersediaan data statistik sektoral 89% dilakukan melalui strategi :

1) Pelaksanaan Forum Data yang diselenggarakan satu kali selama tahun 2024 oleh Bapperida Kota Bogor sebagai sekretariat Forum Satu Data berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 400.11.7/Kep.347-Bappeda/2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Bogor Tahun 2024. Tugas Forum Satu Data:
   a) menyusun rencana kerja Forum Satu Data Kota Bogor Tahun 2024.
   b) meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data dan informasi.
   c) mengkoordinasikan penyelenggaraan satu data daerah dalam mendukung program satu data Indonesia.
   d) menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor.
   e) melaporkan hasil koordinasi Forum Satu Data kepada Wali Kota.
2) Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Bogor Tahun 2024 dengan pemilihan dua kegiatan statistik sebagai lokus penilaian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perhubungan yang menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,7 dengan kategori “Baik”.
3) Menyediakan dokumen API (Application Programming Interface) dengan schema data catalog untuk kebutuhan integrasi antara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Portal Data Kota Bogor dengan Satu Data Indonesia. Saat ini, Portal Data Kota Bogor sudah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia dan Satu Data Jawa Barat.

4) Penambahan metadata pada setiap dataset yang ada pada Portal Data Kota Bogor sesuai dengan standar Badan Pusat Statistik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

A.2. Sasaran 2 : Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi

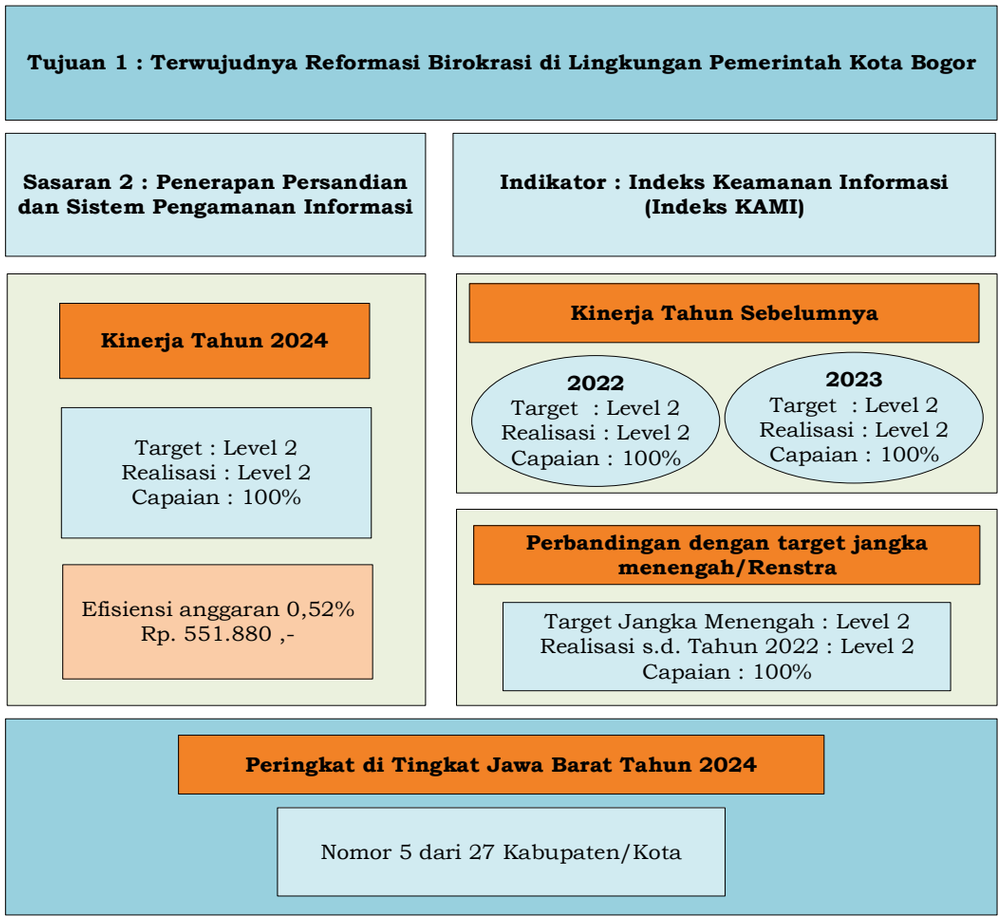

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mewujudkan penerapan persandian dan system pengamanan informasi. Hal ini tercermin dari pencapaian Indeks KAMI sebesar 100%, yaitu dari target level 2 dan terealisasi level 2.

Pada saat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses kerja sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama.

Adapun Indeks KAMI adalah Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Pada tahun 2024, dari target indeks keamanan informasi di level 2, terealisasi level 2, sehingga capaiannya 100%. Diskominfo Kota Bogor melakukan penilaian mandiri terhadap Indeks KAMI dengan hasil Evaluasi akhir "Cukup Baik", dengan Skor Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI yang dinilai secara mandiri sebesar "543" dengan sistem elektronik kategori startegis, dengan sistem elektronik katergori tinggi.

Adapun rincian skor terlihat pada gambar berikut :

Gambar Total Skor Penilaian Mandiri Indeks KAMI Tahun 2024

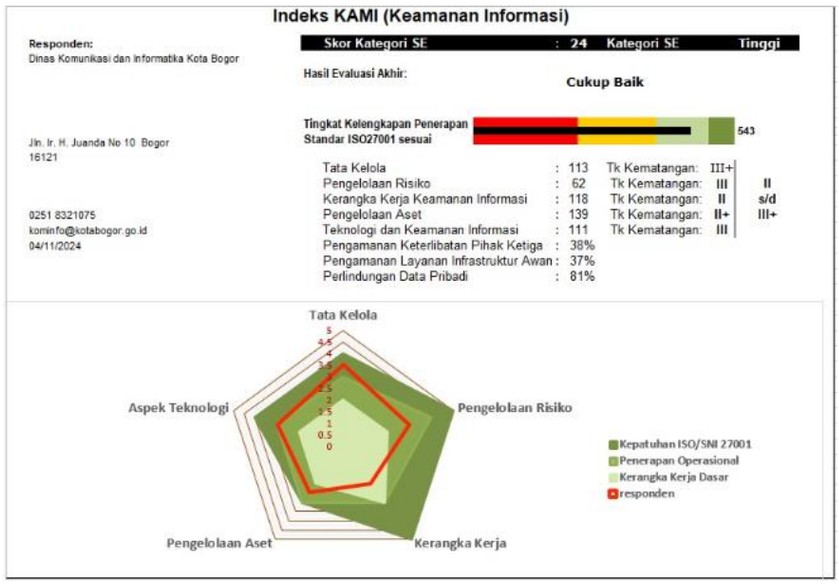

Sumber : Diskominfo 2024

Atas skor hasil verifikasi BSSN, berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan Sni ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi, indeks KAMI diberikan nilai tingkat kesiapan "**cukup baik**". Hal ini didasarkan penyelenggaraan Sistem elektronik telah memiliki Sistem Elektronik **kategori tinggi**, dan mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI "**543**" yang masuk ke dalam rentang 456 sampai dengan 583.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada aspek realisasi, Indeks KAMI sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 Level 2 dan di tahun 2024 Level 2. Namun jika dilihat dari skor akhir penilaian indeks KAMI, pada tahun 2022 sebesar 523 dan meningkat di tahun 2024 sebesar 543.

Pada aspek pencapaian kinerja, Indeks KAMI sama antara capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu 100%.

Gambar Total Skor Penilaian Mandiri Indeks KAMI Tahun 2023

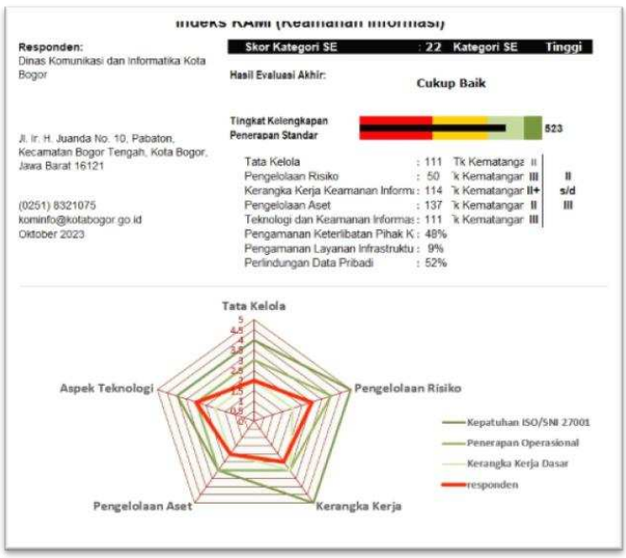

Sumber : Diskominfo 2023

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian indikator kinerja Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dijelaskan dalam tanel berikut :

Tabel Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Keamanan Informasi (KAMI) beberapa tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	Level 1	Level 1	100%
2022	Level 2	Level 2	100%
2023	Level 2	Level 2	100%
2024	Level 2	Level 2	100%

Sumber : Diskominfo 2024

Pencapaian dan indikator kinerja dibandingkan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

tahun-tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, walaupun tingkat capaiannya sama yaitu 100%. namun tingkat keamanannya meningkat 1 level menjadi level 2. Serta skor akhir penilaian Indeks KAMI meningkat sejak tahun 2021 sampai 2024 yaitu 395, 501, 523 dan 543 yang peningkatan terbesarnya disumbang melalui aspek pengelolaan asset.

Gambar Diagram Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

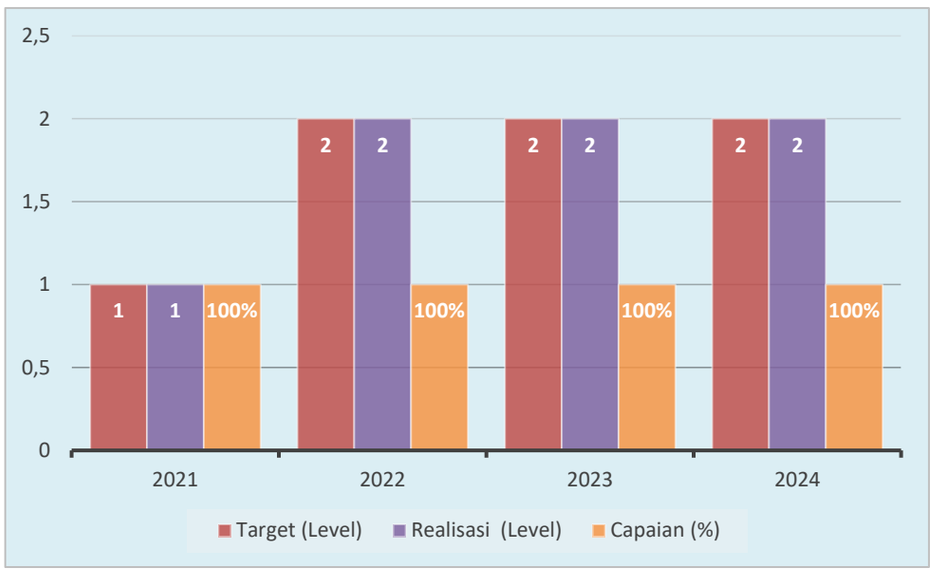

Sumber : Diskominfo 2024

Gambar Diagram Perbandingan Pencapaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

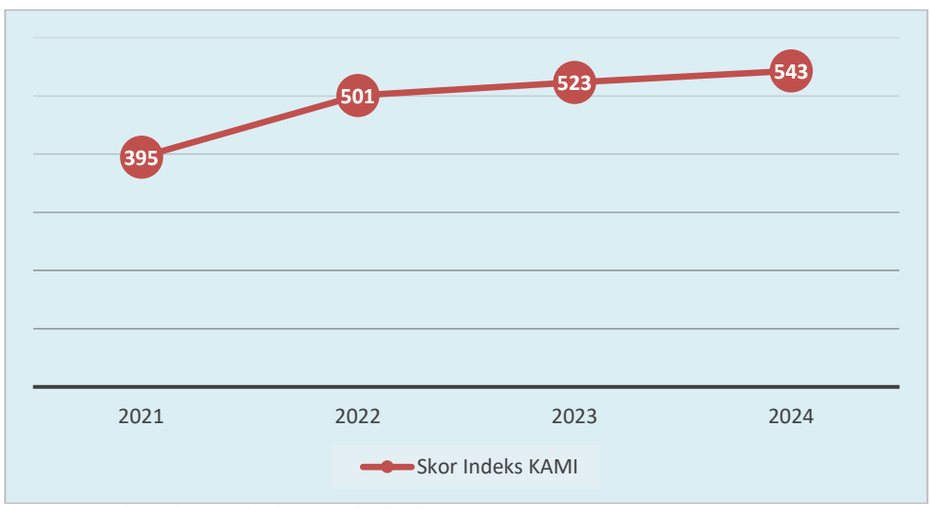

Sumber : Diskominfo 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi kinerja indeks keamanan informasi sudah mencapai target akhir RPJMD/Renstra sebesar 100%. Yaitu dari target akhir renstra sebesar level 2 dan terealisasi level 2.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Karena BSSN tidak mempublikasi nilai rata-rata nasional untuk indikator ini, maka perbandingan dengan rata-rata nasional tidak dapat dianalisis.

Namun berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Indeks KAMI Kota Bogor menempati peringkat ke 5 dari jumlah 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2024

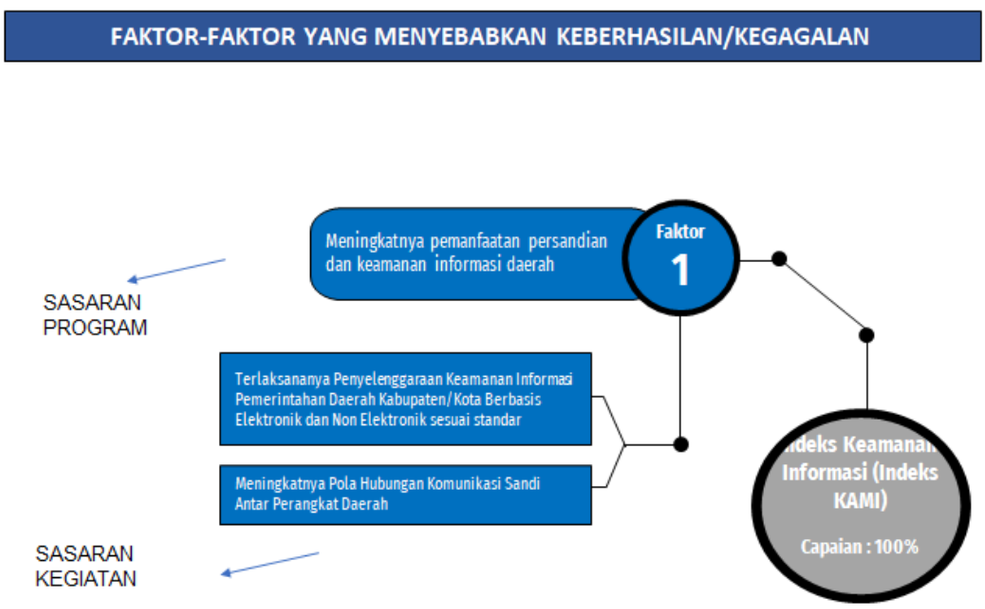

Berdasarkan gambar di atas, Indeks KAMI dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan persandian dan keamanan informasi daerah, yang didukung oleh Terlaksananya Penyelenggaraan Keamanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik sesuai standar dan terlaksananya penyelenggaraan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik sesuai standar.

Pelaksanaan penerapan persandian dan keamanan informasi di Kota Bogor telah mencapai target Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) pada level II. Hal ini merupakan hasil upaya bersama yang didukung oleh seluruh Bidang dan SKPD Kota Bogor, yang secara konsisten menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), aturan, dan kebijakan terkait Keamanan Informasi, serta menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

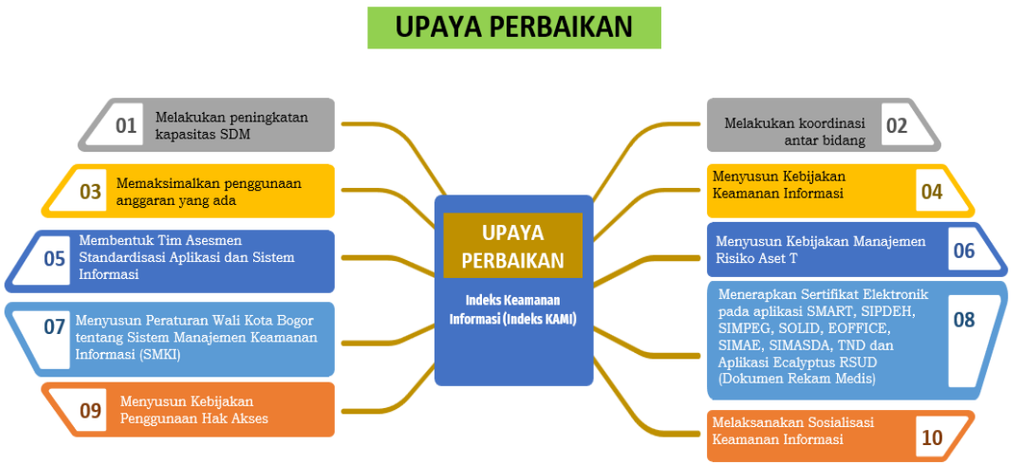

Inovasi yang dilakukan yaitu dengan dibentuknya Tim Tanggap Insiden Siber Kota Bogor melalui Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 000.1.1/KEP.193-DISKOMINFO/2024.

Namun dalam pelaksanaan penerapan persandian dan keamanan informasi masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1) Permasalahan belum adanya SDM yang berkualifikasi di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

   Solusi : Melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan menugaskan staf mengikuti pelatihan terkait persandian dan keamanan informasi yang diadakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Permasalahan porsi anggaran yang belum mencukupi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Solusi : Melakukan koordinasi antar bidang di Diskominfo Kota Bogor untuk bisa melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Keamanan Informasi serta memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada

f. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Pencapaian sasaran Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi dengan indikator Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Adapun pencapaian target kinerja nya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel capaian program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2	Level 2	100

Sumber : diskominfo 2024

Pencapaian target Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) level 2, dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1) Kebijakan Digitalisasi Dokumen

   Pemerintah menyelenggarakan Sertifikat Elektronik yang salah satu fungsinya untuk tanda tangan elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dan layanan kepada masyarakat. Dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan Sertifikat Elektronik pada aplikasi SMART, SIPDEH, SIMPEG, SOLID, EOFFICE, SIMAE, SIMASDA, TND dan Aplikasi Ecalyptus RSUD (Dokumen Rekam Medis).

2) Kebijakan Standar Teknis Keamanan Informasi

   Sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Elektronik, Pemerintah Kota Bogor menyikapi dengan membentuk Tim Asesmen Standardisasi Aplikasi dan Sistem Informasi. Tim ini mempunyai tugas salah satunya adalah memastikan setiap aplikasi yang dibangun memenuhi standarisasi dan kaidah-kaidah keamanan informasi, dengan tujuan aplikasi dapat berjalan secara aman serta mengurangi risiko kerentanan.

3) Kebijakan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 menggunakan Indeks Keamanan Informasi (INDEKS KAMI)

   Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 menggunakan Indeks Keamanan Informasi, Penerapan ISO/IEC 27001 bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional. Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mengimplementasikan peraturan di atas dengan berbagai langkah kegiatan, diantaranya:

   a) Membuat Peraturan Wali Kota Bogor tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
   b) Membuat Kebijakan Keamanan Informasi
   c) Membuat Kebijakan Penggunaan Hak Akses
   d) Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Aset TI
   e) Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

A.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah

a. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mewujudkan meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup perangkat daerah. Hal ini tercermin dari pencapaian indeks reformasi birokrasi sebesar 103,45%, yaitu dari target 87,5 dan terealisasi 90,52.

Reformasi birokrasi menurut Kementerian PAN RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima yang pelaksanaannya diatur dalam PermenPAN RB No. 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPAN RB No. 25 Tanun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta PermenPAN RB No. 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Indeks Reformasi Birokrasi atau yang sering kali disebut sebagai Indeks RB adalah alat untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 pengukuran Indeks reformasi birokrasi menggunakan alat aplikasi Surabi Jabar yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang telah diverifikasi oleh Tim RB Tingkat Kota, nilai indeks reformasi Diskominfo sebesar 90,48. Adapun capaian Komponen penilaian indeks reformasi pada Dinas Komunikas dan Informatika dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024

Indikator Penilaian			Bobot	Nilai
RB General				
A	Capaian Sasaran Strategis		34	30.87
	A.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6	5.39
	A.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	4	4.00
	A.3	Tindaklajut Rekomendasi (TLHP)	4	4.00
	A.4	Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah	4	3.94
	A.5	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	4	2.92
	A.6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	4	3.85
	A.7	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	4	3.21
	A.8	Indeks Profesionalitas ASN	4	3.55
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		26	21.80
	B.1	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	6	6.00
	B.2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4	2.40
	B.3	Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	4	2.86
	B.4	Nilai Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah	4	3.40
	B.5	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	4	4.00
	B.6	Tingkat Digitalisasi Arsip	4	3.14
C	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General		5	5.00
	C.1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2	2.00
	C.2	Capaian Rencana Aksi RB General	3	3.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Indikator Penilaian			Bobot	Nilai
RB Tematik				
A	Strategi Membangunan RB Tematik		5	5.00
	A.1	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	2	2.00
	A.2	Capaian Rencana Aksi RB Tematik	3	3.00
B	Capaian Dampak RB Tematik		30	27.85
	B.1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10	9.85
	B.2	Capaian Kinerja Core Business Organisasi	20	18.00
Indeks Reformasi Birokrasi			**100**	**90.52**

Sumber : Surabi Jabar 2024

Pada tahun 2024, dari target indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,50 terealisasi 90,52, sehingga capaiannya sebesar 103,45%. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata capaian Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang nilainya sebesar 86,67.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada aspek realisasi, indeks reformasi birokrasi meningkat sebesar 3,1 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 87,42 dan di tahun 2024 sebesar 90,52. Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja indeks reformasi birokrasi mengalami penurunan 4,48% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 107,93% dan pada tahun 2024 sebesar 103,45%.

Indeks Reformasi Birokrasi dan komponen penilaian pada tahun 2023 penilaiannya berdasarkan pada Keputusan Wali Kota Bogor No. 061/Kep.144-Org/2023 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Wali Kota Bogor No. 061.45-300 Tahun 2018 tentang Rad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2014 yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dimana indicator dan bobot penilaian pengukuran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 meliputi 12 indikator penilaian.

Adapun Indeks Reformasi Birokrasi dan komponen penilaian pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika dijelaskan pada tabel berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Tabel Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2023

No	Indikator Penilaian	Bobot	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB	
			Diskominfo	Rata-Rata PD Kota Bogor
1	Nilai SAKIP	14,00	12,42	11,99
2	Capaian IKU	10,00	10,00	8,26
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	10,00	8,00	9,00
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	8,00	4,95	3,32
5	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	8,00	8,00	8,00
6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Intern	8,00	4,84	4,97
7	Indeks Kematangan Organisasi	8,00	8,00	7,50
8	Indeks Profesionalitas ASN	6,00	5,14	5,11
9	Laporan Realisasi APBD	12,00	11,77	11,40
10	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah pda SPSE	8,00	7,11	6,45
11	Penghargaan Perangkat Daerah	4,00	4,00	2,69
12	Nilai Rata-Rata Penerapan core value BerAhlak Pegawai	4,00	3,19	2,74
Indeks Reformasi Birokrasi		**100**	**87,42**	**81,44**

Sumber : Diskominfo 2023

Perbandingan kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan perbedaan indikator, maka capaian dari tahun ke tahun tidak dapat diperbandingkan sebagaimana dijelaskan dalam tabel dan diagram berikut :

Tabel Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	NA	NA	NA
2022	80,01	71,02	88,76%
2023	81	87,42	107,93%
2024	87,50	90,52	103,45%

Sumber : Diskominfo 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Gambar Diagram Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Beberapa Tahun terakhir

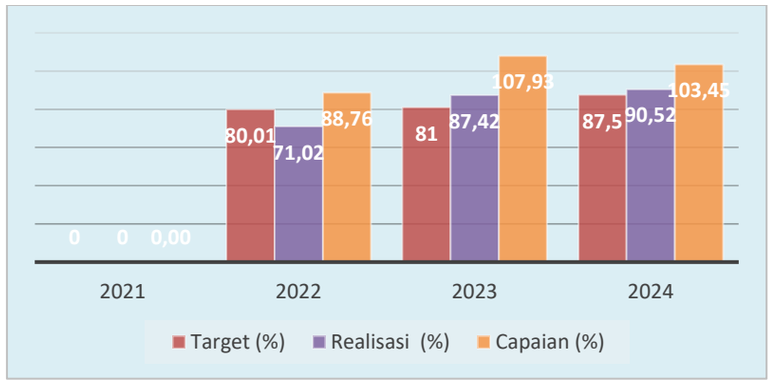

Sumber : Diskominfo 2024

Dapat dilihat bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan. Yaitu pada tahun 2022 sebesar 71,02 poin, meningkat pada tahun 2023 sebesar 87,42 poin dan meningkat lagi pada tahun 2024 sebesar 90,52 poin. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan dengan semakin baik dalam mewujudkan pelayanan yang prima.

Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 19,17%, yaitu tahun 2022 sebesar 88,76% dan tahun 2023 sebesar 107,93% sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,48% yaitu tahun 2023 sebesar 107,93% dan pada tahun 2024 sebesar 103,45%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sudah mencapai target akhir RPJMD/Renstra sebesar 103,45%. Yaitu dari target akhir renstra sebesar 87,5 poin dan terealisasi 90,41 poin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Karena KemenPanRB tidak mempublikasi nilai rata-rata nasional untuk indikator ini, maka perbandingan dengan rata-rata nasional tidak dapat dianalisis.

Namun berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat, Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika lebih tinggi dari rata-rata realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di jawa Barat dengan selisih 7,11 poin, yaitu Indeks RB Diskominfo sebesar 90,52 dan rata-rata Indeks RB Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 83,41 poin.

Adapun posisi di Pemerintah Kota Bogor menempati peringkat ke 7 dari jumlah 36 Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bogor. Dan berada di atas rata-rata realisasi Indeks RB Perangkat Daerah di Lingkingan Kota Bogor dengan selisih 3,86 poin, yaitu indeks Rata-Rata Perangkat Daerah sebesar 86,67 poin.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2024

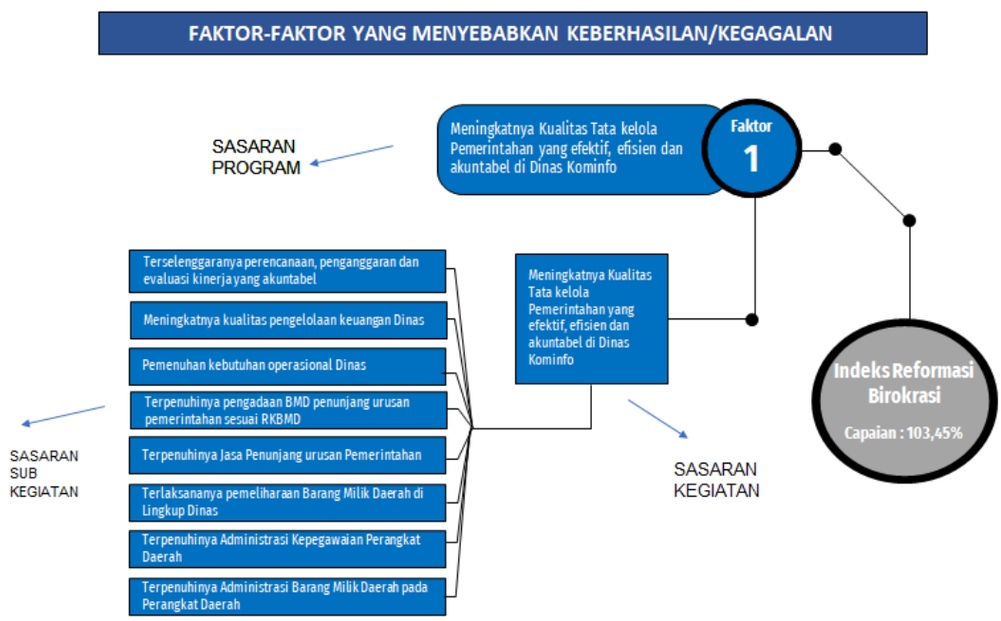

Berdasarkan gambar di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika dipengaruhi oleh Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

akuntabel, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas, terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas, terpenuhinya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD, terpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan, terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di lingkup perangkat daerah, terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah dan terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah..

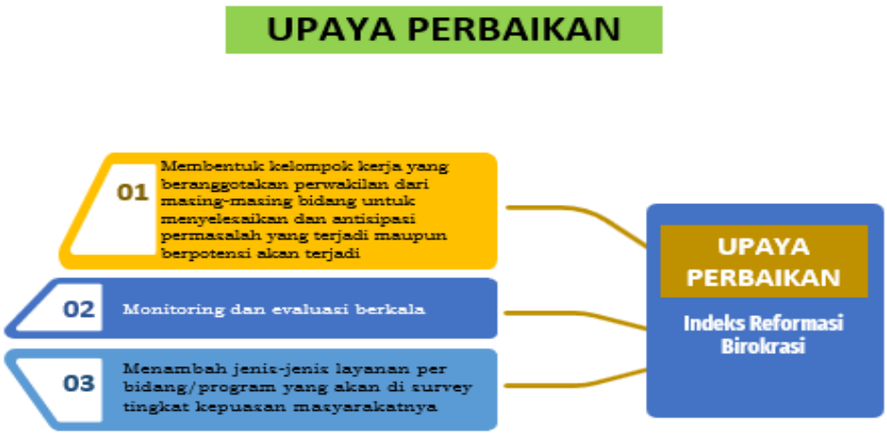

Keberhasilan pencapaian target kinerja di tahun 2024 dengan realisasi 90,48 dan capaian 103,41% didukung oleh peran serta dan partisipasi aktiv dari Bidang-Bidang sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitong dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan. Serta komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan menerapkan budaya kerja yang berlaku di diskominfo.

Alternatif solusi atau **inovasi** yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang dalam menyelesaikan dan mengantisipasi permasalah yang terjadi maupun berpotensi akan terjadi.

f. Analisis program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah didukung oleh Program penunjang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

urusan pemerintah daerah kabupaten / kota. Adapun pencapaian target kinerja nya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	100
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	3,56	3,27	92,11

Sumber : diskominfo 2024

Pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah dengan nilai A, dan Pencapaian target Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 3,27, keduanya menunjang pencapaian indeks reformasi Birokrasi.

Namun demikian, masih terdapat Permasalahan yang dihadapi yang menghambat tercapainya indikator program Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

1) Nilai SKM tidak menggambarkan kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bogor karena hanya menilai 1 pelayanan dari banyak pelayanan.
2) Terdapat beberapa responden yang bias dalam memberikan penilaian, yang terlihat dari nilai yang dipilih bertolak belakang dengan komentar yang ditulis.
3) Tidak semua penerima layanan memberikan penilaian atas layanan yang diterima

Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah-langkah/ **solusi** yang akan dilaksanakan untuk perbaikan kinerja adalah :

1) Menambah jenis-jenis layanan per bidang/program yang akan di survey tingkat kepuasan masyarakatnya, sehingga lebih mencerminkan penilaian kinerja Diskominfo.
2) Menyusun strategi agar penerima layanan memberikan penilaian segera setelah layanan diterima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

A.4. Sasaran 4 : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

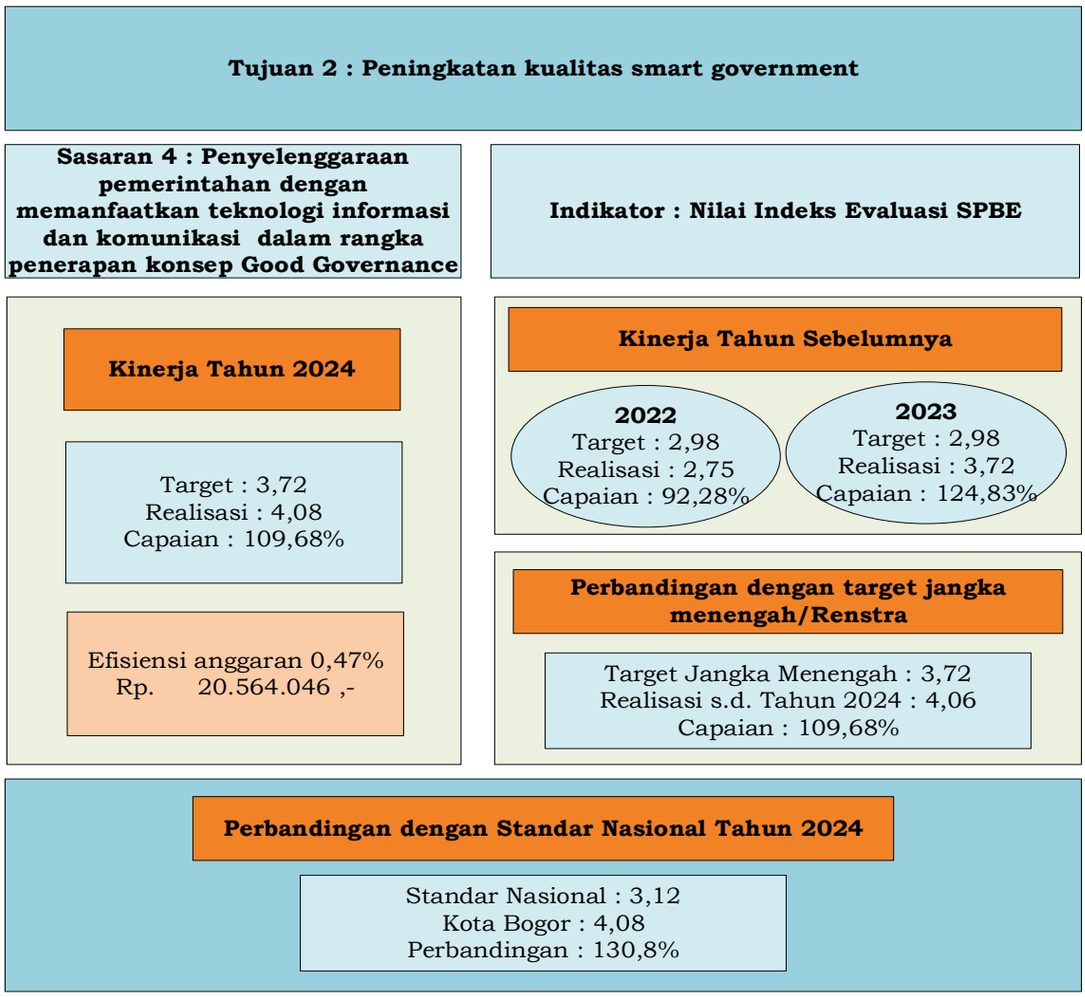

a. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance. Hal ini tercermin dari pencapaian Nilai evaluasi Indeks SPBE sebesar 109,68%, yaitu dari target 3,78 dan terealisasi 4,08.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Adapun Penerapan SPBE diukur dengan nilai indeks SPBE yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di suatu instansi. Nilai ini merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tingkat kematangan SPBE dievaluasi oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada Lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah. Tingkat Kamatangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level yang terbagi dalam pengukuran tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat keaman pada kapabilias fungsi, yang dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Sumber : LHP SPBE Kota Bogor Tahun 2022

Penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan pada 4 domain dan 8 aspek sebagai berikut :

Gambar pemantauan dan evaluasi SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Sumber : LHP SPBE Kota Bogor Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan fase Pemerintah Daerah telah menerapkan transformasi, dimana penguatan infrastruktur SPBE menjadi target utama Pemerintah Daerah. Aktivitas utama yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

dapat dijadikan sebagai prioritas diantaranya, yaitu: mewujudkan proses bisnis terintegrasi melalui penerapan Arsitektur SPBE Nasional dengan pemanfaatan infrastruktur TIK Nasional guna terwujudnya tematik layanan serta meningkatkan literasi digital ASN. Lebih jauh, Tahun 2023 dan Tahun 2024 merupakan fase penuntasan berbagai akselerasi dan pengembangan TIK di seluruh Perangkat Daerah. Harapannya pembangunan TIK 4.0 dan Society 5.0 yang memanfaatkan big data dan artificial dengan prinsip data driven government telah menjadi inti dari seluruh aktivitas birokrasi di Indonesia. Target Nilai SPBE Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 adalah **3,72** dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 (enam ratus lima belas) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan hasil Indeks SPBE Pemerintah Kota Bogor adalah **4,08** dengan Predikat "**Sangat baik**" sehingga capaiannya sebesar **124,83%.**

Gambar Hasil Evaluasi SPBE

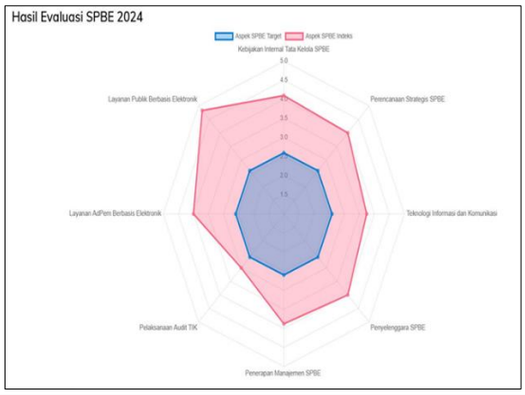

Pemerintah Kota Bogor	
K/L/D	: Pemerintah Kota
Indeks SPBE	: **4.08**
Predikat SPBE	: **Sangat Baik**
Domain Kebijakan SPBE	: **4.10**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 4.10
Domain Tata Kelola SPBE	: **3.90**
Perencanaan Strategis SPBE	: 4.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 3.75
Penyelenggara SPBE	: 4.00
Domain Manajemen SPBE	: **3.64**
Penerapan Manajemen SPBE	: 3.88
Pelaksanaan Audit TIK	: 3.00
Domain Layanan SPBE	: **4.33**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 4.00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4.83

Sumber : KemenPanRB 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada aspek realisasi, Nilai evaluasi Indeks SPBE meningkat sebesar 0,36 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 3,72 poin dan di tahun 2024 sebesar 4,08 poin. Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja Nilai evaluasi Indeks SPBE mengalami penurunan 15,15%%, yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 124,83% dan pada tahun 2024 sebesar 109,68%.

Gambaran perbandingan pencapaian indeks kinerja Indeks SPBE beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks SPBE Beberapa Tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	2,92	3,11	106,51%
2022	2,98	2,75	91,97%
2023	2,98	3,72	124,83%
2024	3,72	4,08	109,68%

Sumber : Diskominfo 2024

Gambar Diagram Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks SPBE Beberapa Tahun terakhir

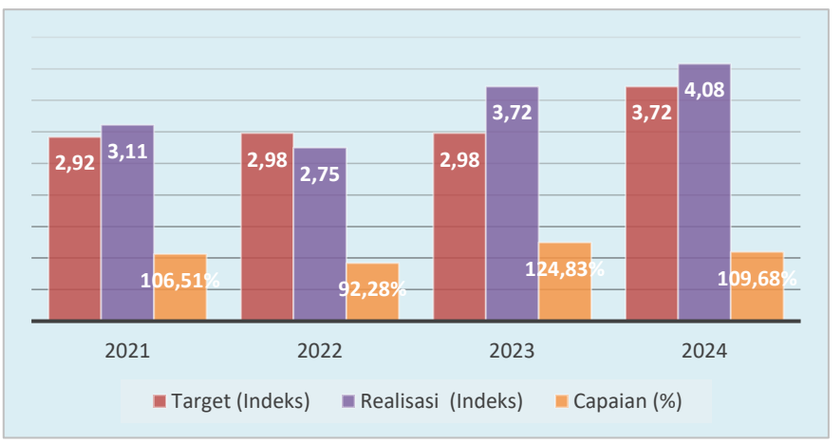

Sumber : Diskominfo 2024

Berdasarkan table dan gambar di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja dibandingkan pada tahun 2021, realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,36 poin. Namun pada tahun 2023 realisasi meningkat sebesar 0,97 poin dibandingkan tahun 2022 dan pada tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

meningkat lagi sebanyak 0,36 poin.

Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja mengalami fluktuatif penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahunnya, yaitu 106,51% pada tahun 2021, menurun 91,97% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 124,83% pada tahun 2023 dan menurun Kembali menjadi 109,68% pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi kinerja Nilai evaluasi Indeks SPBE sudah mencapai target akhir RPJMD/Renstra sebesar 109,68%. Yaitu dari target akhir renstra sebesar 3,72 poin dan terealisasi 4,08 poin.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Jika disandingkan dengan capaian rata-rata nasional, indeks SPBE Kota Bogor sebesar 4,08, lebih tinggi dari rata-rata indeks SPBE tingkat Nasional 3,12.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah Kota Bogor lebih maju dibandingkan dengan rata-rata penerapan nasional.

e. Analisis Penyebab Ketercapaian Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2024

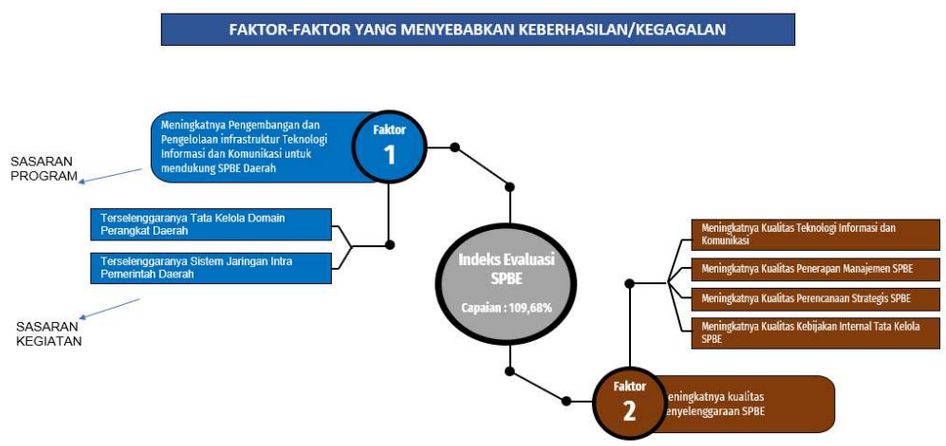

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Berdasarkan gambar di atas, indeks SPBE Kota Bogor dipengaruhi oleh Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung SPBE Daerah yang diperlihatkan dari realisasi nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi sebesar 3,75 poin. yang didukung oleh Terselenggaranya Tata Kelola Domain Perangkat Daerah dan Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Factor lain yang mempengaruhi realisasi indeks SPBE Kota Bogor adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE yang diperlihatkan dari realisasi nilai Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sebesar 4,10 poin, Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE sebesar 4,00 poin dan Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE sebesar 3,88% yang didukung oleh Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen SPBE, Meningkatnya Kualitas Perencanaan Strategis SPBE dan Meningkatnya Kualitas Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

1. Hasil Assesment Evaluasi SPBE menurut aspek SPBE Kota Bogor terlihat Aspek 1 tentang Kebijakan Internal Tata Kelola telah mencapai Indeks 4.10 dari 5.0, Aspek 2 tentang Perencanaan Strategis SPBE telah mencapai Indeks 4.00 dari 5.0, Aspek 3 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mencapai Indeks 3.75 dari 5.0, Aspek 4 tentang Penyelenggaraan SPBE telah mencapai Indeks 4.00 dari 5.0 Aspek 5 tentang Penerapan Manajemen SPBE telah mencapai Indeks 3.88 dari 5.0, Aspek 6 tentang Pelaksanaan Audit TIK telah mencapai Indeks 3.00 dari 5.0, Aspek 7 tentang Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah mencapai Indeks 4.00 dari 5.0, dan Aspek 8 tentang Layanan Publik Berbasis Elektronik telah mencapai Indeks 4.83 dari 5.0.
2. Berdasarkan baseline sebaran level kematangan domain indikator SPBE, terlihat bahwa sebaran level kematangan untuk seluruh domain didominasi dengan “rata tengah” atau pada level kematangan yang baik (Level 4). Secara keseluruhan, tingkat kematangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024, Rekap Nilai Indeks, Naik sebanyak 10 indikator dan Tetap 2 indikator,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

dengan Rekap Nilai Tingkat Kematangan 10 Indikator Naik, 28 Indikator Tetap dan hanya 1 indikator yang mengalami penurunan dari nilai indeks tahun 2023, yaitu Indikator Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dari level 4 menjadi level 3.

3. Kekuatan peningkatan nilai Indeks SPBE di tahun 2024 terdapat pada kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Bogor dan kematangan kolaborasi penerapan SPBE dimana kolaborasi antar perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu dan telah dilakukan reviu dan evaluasi, juga dukungan peran serta aktif Tim Pelaksana SPBE dalam penyampaian bukti dukung atau evidence evaluasi SPBE, juga support dari Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Bogor, yang memacu untuk implementasi SPBE di setiap perangkat daerah.

Indikator yang mengalami penurunan dari nilai indeks tahun 2023, yaitu Indikator Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dari level 4 menjadi level 3.

Solusi dan Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan Tingkat Kematangan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang mengalami penurunan engan melakukan beberapa hal, seperti:

- Melakukan evaluasi dan reviu secara berkala terhadap penerapan SPBE
- Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan SPBE
- Meningkatkan kapasitas pelaksanaan SPBE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

- Memperkuat Digital Public Infrastructure
- Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data
- Menyiapkan ASN yang memiliki kompetensi digital

Selain itu, beberapa aspek yang dapat dievaluasi dalam peningkatan tingkat kematangan SPBE, di antaranya:

- Pada aspek kebijakan internal SPBE, perlu diselenggarakan proses reviu dan evaluasi secara periodik terhadap kematangan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi, kematangan kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi, dan kematangan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, perlu diselenggarakan proses reviu dan evaluasi secara periodik terhadap kematangan Arsitektur SPBE Instansi, kematangan Peta Rencana SPBE, dan kematangan inovasi Proses Bisnis SPBE.
- Pada aspek TIK, perlu diselenggarakan proses reviu dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan kematangan layanan Pusat Data dan kematangan layanan Jaringan Intra Instansi.
- Pada aspek penyelenggara SPBE, perlu ada tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kematangan kolaborasi penerapan SPBE dari hasil reviu dan evaluasi.
- Pada aspek penerapan manajemen SPBE, penerapan kematangan Manajemen Perubahan perlu dilaksanakan oleh seluruh unit.
- Pada aspek pelaksanaan Audit TIK, perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik pada kematangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, kematangan pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan kematangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
- Pada aspek layanan administrasi SPBE, perlu dilakukan perbaikan optimalisasi secara periodik terhadap kematangan layanan pengawasan Internal Pemerintah, kematangan layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan kematangan layanan Kinerja Pegawai
- Pada aspek layanan publik berbasis elektronik, perlu diselenggarakan proses reviu dan evaluasi secara periodik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

terhadap kematangan layanan pengaduan pelayanan publik, kematangan layanan data terbuka, dan kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

f. Analisis program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Indeks SPBE

Pencapaian sasaran Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance dengan indikator Indeks SPBE, didukung oleh Program Aplikasi Informatika. Adapun pencapaian target kinerja nya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel capaian program Aplikasi Informatika

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
Program Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,70 indeks	4,10 indeks	110,81
	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	3,30 indeks	4.00 indeks	121,21
	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,50 indeks	3,75 indeks	107,14
	Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	3,00 indeks	3,88 indeks	129,33

Sumber : Diskominfo 2024

Walaupun terget indicator kinerja sasaran strategis Indeks SPBE telah melebihi target, namun terdapat permasalahan pada Program Aplikasi Informatika. Berdasarkan Data Hasil Evaluasi SPBE Kota Bogor Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024) :

1. Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang capaiannya 121 %.

   Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE serta Inovasi Proses Bisnis SPBE.

   Nilai aspek perencanaan terpenuhi, dan telah dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

penginputan Data Arsitektur SPBE pada Aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE versi 2.

2. Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang capaiannya 129 %.

   Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

   Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE dan Penerapan Manajemen Data menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemerintah Kota Bogor. Penerapan Manajemen Risiko SPBE dibuktikan dengan adanya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko pada perangkat daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 161 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dokumen Manajemen Risiko SPBE Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh perangkat daerah sebagai penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE, dan di dalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan kebijakan strategis. Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh perangkat daerah.

   Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Penerapan Manajemen Data SPBE dibuktikan dengan adanya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor dan penerapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Manajemen Data dilakukan melalui Forum Satu Data dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 050/Kep.85-Bappeda/2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Bogor Tahun 2023, sebagai penerapan kegiatan manajemen data, dalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan Manajemen Data, dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data dan diterapkan ke seluruh perangkat daerah, selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Penghambat target Penerapan Manajemen SPBE antara lain Pemerintah Kota Bogor masih belum memiliki penerapan manajemen yang mengatur secara komprehensif terkait Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Perubahan

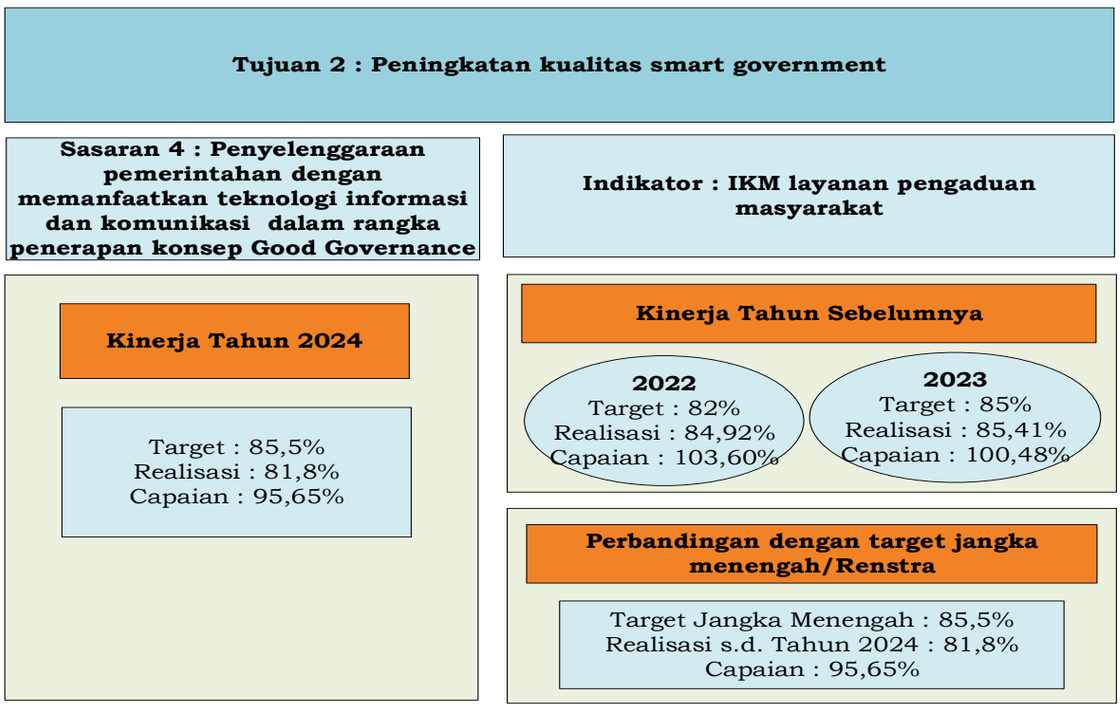

a. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, dari target IKM Pengaduan Masyarakat sebesar 85,5% terealisasi 81,78%, sehingga capaiannya sebesar 95,65%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance, ditentukan oleh indikator IKM Layanan Pengaduan Masyarakat.

IKM (Indeks kepuasan masyarakat) ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepuasan masyarakat terhadap pengaduan masyarakat yang masuk via aplikasi pengaduan masyarakat sibadra serta tindak lanjut aduan oleh perangkat daerah yang bersifat pelayanan publik. Semakin besar indeks IKM Pengaduan Masyarakatnya, maka semakin bagus saluran pengaduan masyarakat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan semakin bagusnya saluran pengaduan masyarakat, maka peran serta pemantauan masyarakt terhadap kualitas pelayanan public menjadi sebakin baik. Dengan demikian akan mendorong capaian penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik.

Berdasarkan Permen PAN RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, IKM Pengaduan masyarakat sebesar 81,78% dapat diinterprestasikan bahwa pelayanan termasuk ke dalam kriteria Baik dengan mutu pelayanan B, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,0 – 64,99	D	tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	sangat baik

Sumber : Permen PAN RB nomor 14 tahun 2017

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada aspek realisasi, IKM layanan pengaduan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 3,63%. dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 85,41% dan di tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

2024 sebesar 81,78%. Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja IKM layanan pengaduan Masyarakat mengalami penurunan 4,83% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,48% dan pada tahun 2024 sebesar 95,65%.

Perbandingan Pencapaian Indikator IKM Layanan Pengaduan Masyarakat Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Pencapaian Indikator IKM Layanan Pengaduan Masyarakat Beberapa Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	NA	77,7%	NA
2022	82%	84,92%	103,60%
2023	85%	85,41%	100,48%
2024	85,5%	81,78%	95,65%

Sumber : Diskominfo 2024

Dikarenakan perbedaan indikator, maka capaian dan target pada tahun 2021, tidak dapat dikukur, namun Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan SKM untuk mengukur IKM Layanan Pengaduan Masyarakat dan didapat sebesar 77,7%. Berdasarkan pada tabel, terlihat bahwa IKM layanan pengaduan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan di tahun 2024.

Sedangkan pada aspek pencapaian kinerja mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, yaitu 103,60% pada tahun 2022, menjadi 100,48% pada tahun 2023 dan menjadi 95,65% pada tahun.

Gambar Diagram Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja IKM Layanan Pengaduan Masyarakat Beberapa Tahun Terakhir

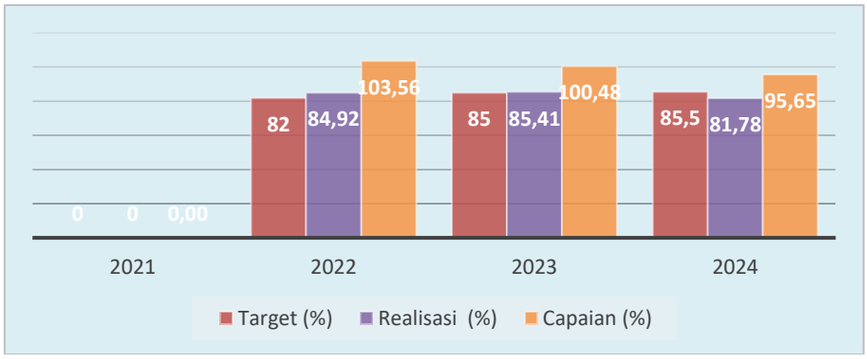

Sumber : Diskominfo 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Jika disandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja IKM layanan pengaduan masyarakat belum mencapai target akhir RPJMD/Renstra sebesar 95,65%. Yaitu dari target akhir renstra sebesar 85,5% dan terealisasi 81,78%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Karena indikator ini hanya digunakan di kota Bogor saja, maka perbandingan dengan rata-rata nasional tidak dapat dianalisi.

e. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Serta Alternative Solusi pada Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, IKM layanan pengaduan masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang diperlihatkan dari realisasi Nilai Keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif. Hal ini didukung oleh terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat, terselenggaranya keterbukaan informasi publik, terselenggaranya penyebarluasan informasi melalui media massa, tv dan radio dan terkelolanya media sosial dan website sebagai sarana komunikasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Dalam hal pelayanan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mencapai kinerja baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,78% (Mutu Baik). Namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 85,5%

Ketidakberhasilan disebabkan **kekeliruan dalam pengentrian data** Capaian IKM Layanan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, data yang seharusnya dientry adalah hasil realisasi dari Survey IKM Pengaduan Masyarakat yaitu sebesar **86,39** %, sedangkan yang tercantum pada realisasi kinerja adalah hasil realisasi survey dari laporan Triwulan 1 yaitu sebesar 81,78%, sehingga terdapat kekeliruan pengentrian data IKM Layanan Pengaduan Masyarakat terlihat lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menyebabkan IKM tidak tercapai.

Hasil SKM 81,78% tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dimana pada tahun 2024 dalam pelayanan pengaduan mendapatkan peringkat kedua se Jawa Barat.

Adapun **Solusi** untuk Peningkatan Kinerja yang adalah melakukan koordinasi dan pengawasan lebih lanjut dalam mengantisipasi terjadinya Human Error, agar potensi kekeliruan pengentrian data tidak terjadi kembali di kemudian hari

f. Analisis program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja IKM Layanan Pengaduan Masyarakat

Pencapaian sasaran Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

penerapan konsep Good Governance dengan indikator IKM layanan pengaduan masyarakat didukung oleh Program Informasi Dan Komunikasi Publik. Adapun pencapaian target kinerjanya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Program Informasi Dan Komunikasi Publik

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level Cukup Informatif	Level Informatif	133,33 %

Sumber : diskominfo 2024

Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses, namun terdapat pula Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi yang bersifat terbuka, harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah. Nilai Keterbukaan Informasi publik dengan kinerja Cukup informatif ini berdasarkan hasil dari monitoring dan evalusi yang dilaksanakan setuap tahun oleh komisi informasi Provinsi Jawa Barat.

Namun demikan masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Publik

   a) Kurangnya ketersediaan jaringan internet yang sering terputus yang mengakibatkan aplikasi SiBadra dan Call Center menjadi terganggu.

      Solusi: Diskominfo memiliki Tim Pemeliharaan Jaringan Internet yang setiap bulannya melakukan pemeriksaan secara rutin.

   b) Kurangnya komitmen perangkat daerah, terkait tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat pada Aplikasi SiBadra yang menyebabkan laporan aduan masyarakat belum ditindaklanjuti.

      Solusi: Dilakukan monitoring ke perangkat daerah agar admin-admin yang memverifikasi dapat menyampaikan ke

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

pimpinan Perangkat Daerah, agar pengaduan masyarakat yang masuk dapat segera ditindaklanjuti

c) Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) di perangkat daerah yang mengoperasikan Aplikasi SiBadra

Solusi: Perangkat Daerah membuatkan Sprint/Surat Tugas dengan menunjuk 1 orang yang dapat mengoperasikan Aplikasi SiBadra, baik asn ataupun non asn dan diharapkan tidak berganti dengan periodik yang singkat, apabila terjadi maka diharapkan dapat mentransfer knowledge kepada petugas/admin yang baru.

2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Keterbatasan peralatan kerja menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi dalam memberikan informasi pada media komunikasi publik. Perangkat yang ada kurang mendukung karena usia dan kerusakan yang dialami saat bekerja. Sebagai salah satu solusi personil menggunakan perangkat yang ada dan membutuhkan waktu yang lebih lama menyelesaikan target pekerjaan.

Selain itu, media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik juga terkendala oleh aturan pihak ketiga sebagai pemilik media, sehingga saat pengembalian akun yang mengalami pengambilalihan paksa/hack oleh orang yang tidak bertanggungjawab membutuhkan prosedur yang cukup lama.

3. Layanan Hubungan Media (publikasi pada media massa)

a) Belum terpenuhinya kerja sama dengan media massa baik cetak maupun online dan radio secara merata sehingga publikasi mengenai kebijakan pemerintah tidak semuanya dapat diketahui oleh masyarakat baik mengenai pencapaian ataupun regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Solusi: lebih banyak melakukan kemitraan atau kerja sama dengan media online, cetak maupun elektronik dan dilaksanakannya gathering dengan media sehingga capain itu dapat terpublikasikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

b) Terkait Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), belum adanya sosialisasi dan pertemuan-pertemuan dengan kelompok informasi masyarakat di seluruh kelurahan di Kota Bogor.

Solusi: perlu adanya sosialisasi dan pertemuan dengan kelompok informasi masyarakat seluruh kelurahan di Kota Bogor.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah Rp 24.006.584.121,00 (dua puluh empat milyar enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah). Sementara target biaya untuk semua Kegiatan yaitu sebesar Rp 24.145.564.778,00 (Dua puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 0,58% atau sebesar Rp 138.980.657,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Secara keseluruhan, realisasi dan efisiensi dapat dilihat dalam gambar berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Gambar Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

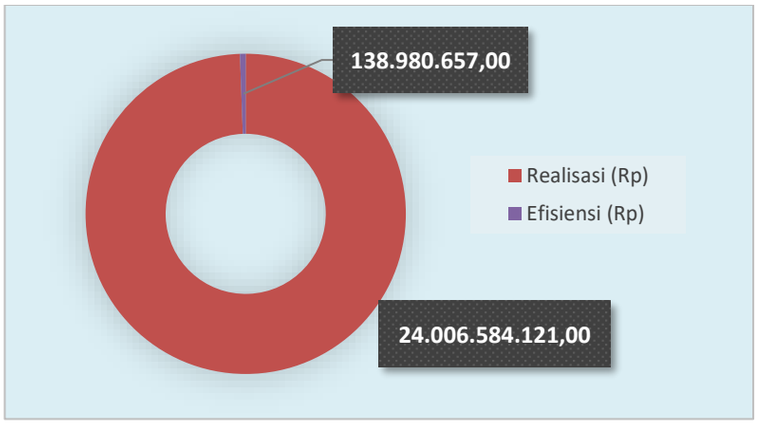

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian	Efisiensi
1	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	267.165.500	263.967.632	3.197.868	98,80%	1,20%
2	Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	105.655.100	105.103.220	551.880	99,48%	0,52%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	15.805.610.153	15.692.001.742	113.608.411	99,28%	0,72%
4	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	4.413.479.736	4.392.915.690	20.564.046	99,53%	0,47%
		IKM layanan pengaduan masyarakat	3.553.654.289	3.552.595.837	1.058.452	99,97%	-

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Selanjutnya Analisis efisiensi didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 4 sasaran, 3 sasaran capaian kinerjanya sudah melebihi target, sedangkan 1 sasaran yang memiliki 2 indikator, 1 capaian kinerjanya tidak mencapai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran "Tersedianya data statistik sektoral", **tercapai** melalui kinerja "Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral" sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 1,20%
2. Sasaran "Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi", **tercapai** melalui kinerja "Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)" sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0,52%.
3. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah", **tercapai**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

melalui kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah” sebesar 103,43% dan efisiensi anggaran sebesar 0,72%.

4. Sasaran “Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance”, **tercapai** melalui kinerja “Nilai Indeks Evaluasi SPBE” sebesar 109,68% dan efisiensi anggaran sebesar 0,47% adapun kinerja “IKM layanan pengaduan masyarakat” sebesar 96,65% **tidak tercapai** targetnya sehingga tidak terdapat efisiensi.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

1. Pencapaian Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 secara ringkas tertuang dalam tabel sebagai erikut :

Tabel Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA OPERASI	**24.129.951.078,00**	**23.990.985.851,00**	**99,42**
Belanja Pegawai	13.016.590.892,00	13.004.555.063,00	99,91
Belanja Barang dan Jasa	11.113.360.186,00	10.986.430.788,00	98,86
BELANJA MODAL	**15.613.700,00**	**15.598.270,00**	**99,90**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.613.700,00	15.598.270,00	99,90
JUMLAH	**24.145.564.778,00**	**24.006.584.121,00**	**99,42**

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Secara keseluruhan dari alokasi belanja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp 24.145.564.778,00 (Dua puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) terealisasi Rp 24.006.584.121,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

(dua puluh empat milyar enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh dua persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi** alokasi anggaran sebesar Rp 24.129.951.078,00 (Dua puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah), terealisasi Rp 23.990.985.851,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,42 % (sembilan puluh sembilan koma empat puluh dua persen) terdiri dari :
   1) Belanja Pegawai, alokasi anggaran sebesar Rp. 13.016.590.892,00 (Tiga belas milyar enam belas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) terealisasi Rp 13.004.555.063,00 (Tiga belas milyar empat juta lima ratus lima puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,91 % (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen).
   2) Belanja Barang dan Jasa, alokasi anggaran sebesar Rp. 11.113.360.186,00 (Sebelas milyar seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), terealisasi Rp 10.986.430.788,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau dengan persentase sebesar 98,86 % (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh enam persen).

b. **Belanja Modal** alokasi anggaran sebesar Rp 15.613.700,00 (Lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), terealisasi Rp 15.598.270,00 (Lima belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,90 % (sembilan puluh sembilan koma semilan puluh persen) terdiri dari :

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin, alokasi anggaran sebesar Rp 15.613.700,00 (Lima belas juta enam ratus tiga belas ribu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

tujuh ratus rupiah), terealisasi Rp 15.598.270,00 (Lima belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,90 % (sembilan puluh sembilan koma semilan puluh persen).

2. Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2020	23.193.568.684,00	21.682.323.729,00	93,48
2021	25.633.406.676,00	24.717.723.498,00	96,43
2022	25.414.121.078,00	25.016.767.280,00	98,44
2023	22.412.547.528,00	21.890.465.867,00	97,67
2024	24.145.564.778,00	24.006.584.121,00	99,42

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa, capaian anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2023 yang disebabkan realisasi Belanja pegawai yang mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Hal ini dapat terlihat pada grafik berikut :

Gambar Diagram Perbandingan Pencapaian Akuntabilitas Keuangan

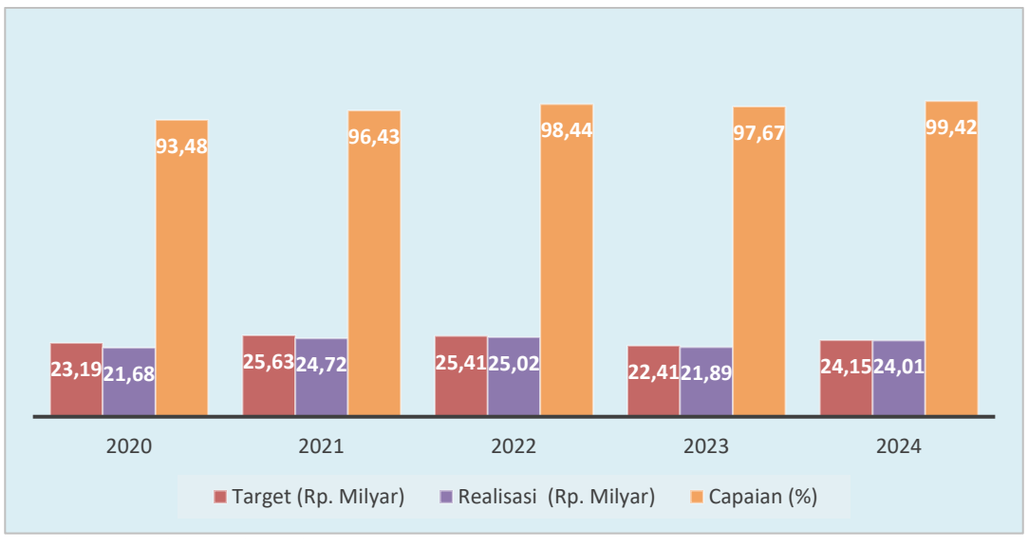

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor selama tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja tahun 2024.

A. KESIMPULAN

Sasaran yang dicapai dengan target indikator yang telah ditetapkan semuanya telah diukur dan dievaluasi capaiannya seperti yang telah dijabarkan dalam laporan ini. Pencapaian itu dihasilkan melalui perhitungan permbandingan antara realisasi dan target pada indikator kinerja sasaran.

Pada Tahun 2024, dari 4 (empat) Saran dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, 4 (empat) indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu indikator :

1. Persentase penyediaan data Statistik Sektoral, dari target 89% realisasinya 89% atau capaian target sebesar 100%.
2. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), dari target level 2 realisasinya level 2 atau capaian sesuai dengan target sebesar 100%.
3. Indeks Reformasi Birokrasi , dari target 87,5 realisasinya 90,50 atau capaian melebihi dengan target sebesar 103,43%.
4. Nilai Indeks Evaluasi SPBE, dari target 3,72 realisasinya 4,08 atau capaian melebihi target sebesar 109,68%

Adapun 1 indikator sasaran yang tidak mencapai targetnya adalah indikator IKM layanan pengaduan masyarakat, dari target 85,5% realisasinya 81,78%, atau dengan capaian sebesar 96,21%.

Hal ini disebabkan adanya human eror dalam pengimputan data realisasi SKM pada aplikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, saran terhadap pelaksanaan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Agar mempertahankan dan meningkatkan capaian realisasi terhadap sasaran dan indicator kinerja di tahun 2025
2. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap realisasi sasaran dan indikator kinerja.
3. Terhadap indikator sasaran yang tidak tercapai kinerjanya yaitu indikator IKM layanan pengaduan masyarakat agar melakukan koordinasi dan pengawasan lebih lanjut dalam mengantisipasi terjadinya Human Error, agar potensi kekeliruan pengentrian data tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas pencapaian sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja tahun 2024 dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran selanjutnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id